

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini penulis akan membahas tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan judul penelitian penulis yaitu Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Konsumen pada Jual Beli Barang Impor Melalui “*Black Market*” (Pasar Gelap) (Studi Kasus Di Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Malang) diantaranya tinjauan perlindungan hukum, tinjauan perlindungan konsumen, tinjauan jual beli, tinjauan barang impor, tinjauan “*Black Market*”(Pasar Gelap), dan peran Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Tinjauan dalam BAB II ini akan menjadi dasar rujukan sebagai penunjang hasil observasi yang nantinya akan dipaparkan pada BAB III sehingga dapat menjawab permasalahan dengan maksimal.

A. Tinjauan Umum Teori Efektifitas Hukum

1. Teori-teori tentang Efektivitas Hukum

Efektif berasal dari Bahasa Inggris yakni *effective* yang bermakna sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, dan hasil guna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif

adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan¹.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum².

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif³.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dengan melihat 5 faktor, yakni⁴ :

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/efektif>, diakses tanggal 5 Mei 2020

² Septi Wahyu Sandiyoga. 2015. *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. Hal. 11

³ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Press. Hal .303

⁴ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

- a. Faktor hukumnya sendiri yang dimaksud disini adalah undang-undangnya.

Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

- b. Faktor penegakan hukum, didalamnya yakni pihak-pihak yang membentuk dan/atau menerapkan hukum.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

- c. Faktor sarana prasarana dalam mendukung penegakan hukum.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum

- d. Faktor masyarakat, artinya dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen

pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

e. Faktor kebudayaan, yang berarti hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Dapat dikatakan efektivitas mengandung arti keefektifan atas pengaruh keberhasilan dalam menilai hukum yang ada telah berjalan atau tidak. Dengan kata lain hukum akan menjadi efektif jika penerapannya dapat mencegah kekacauan.

3. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektifan suatu Undang-Undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti

kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia⁵.

Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum⁶.

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat Compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat Internalization, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi⁷.

⁵ Beni Ahmad Saebani. 2007. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 197

⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press. Hal.220

⁷ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup. Hal. 375.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintah lah actor security⁸.

2. Perbedaan Penegakan Hukum

a. Subjek

Ditinjau dari sudut subjeknya, dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005. Hal. 21.

hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

b. Objek

Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit⁹.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah salah satu upaya untuk dapat memberikan fungsi norma hukum dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki timbal balik bagi masyarakat, menurut Soerjono Soekanto pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan

⁹ Agus Rahardjo. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. hal. 76.

nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup¹⁰.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berisi tentang keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya sebagai tugas dari semua penegak hukum yang sudah terkenal secara konvensional, akan tetapi sudah menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum public pemerintah yang bertanggungjawab¹¹.

4. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum bersifat preventif dan juga represif. Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan. Penegakan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman kesadaran bagi masyarakat, maupun pihak-pihak terkait. Sementara penegakan hukum represif dilakukan, apabila setelah terjadi pelanggaran hukum. Maksudnya dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika terjadi suatu pelanggaran hukum.

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hal.5

¹¹ Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 32

Adapun bentuk-bentuk penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum Administrasi, merupakan salah satu jenis penegakan hukum yang banyak dilakukan dibidang perizinan. Hal ini dapat dipahami karena terhadap pelanggaran yang dapat dipandang relatif ringan diterapkan sanksi administrasi.
- b. Penegakan Hukum Pidana adalah suatu upaya dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*OnRecht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.
- c. Penegakan Hukum Perdata Seperti diketahui, dalam hukum perdata diatur hubungan hukum antara subjek-subjek hukum yang sederajat, yang menyangkut kepentingan orang perorangan¹².

C. Tinjauan Umum *Black Market* (Pasar Gelap)

1. Pengertian *Black Market* (Pasar Gelap)

Istilah *Black Market* (Pasar Gelap) tidak memiliki pengertian yang baku, akan tetapi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 527

¹² Y Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo. Hal.135.

K/Pdt/2006 menggunakan istilah *Black Market* untuk menyebut suatu perdagangan tidak resmi. maksud dari penjelasan tersebut adalah black market adalah sebuah istilah yang merupakan tempat jual beli yang tidak sah dan tidak memiliki ijin untuk melakukan suatu jual beli. *Black Market* (Pasar Gelap) ini cukup luas, selama perdagangan melanggar hukum yang dilakukan di luar jalur resminya. Pasar gelap merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi secara ilegal, lebih khususnya pada pembelian dan penjualan barang secara tidak sah.

2. Proses Terjadinya Jual Beli *Black Market* (Pasar Gelap)

Awal mula pasar gelap ini ada karena adanya pembatasan oleh pemerintah terhadap barang-barang tertentu untuk tujuan menstabilkan peredaran barang yang dibatasi diperdagangkan di pasar Indonesia, pembatasan yang dilakukan bisa berbentuk pajak yang tinggi atas harga barang, syarat-syarat ketentuan barang yang ketat hal ini semua ada untuk menjamin kepentingan kemaslahatan rakyat dalam melakukan suatu perdagangan.

Jual beli pada *Black Market* pada umumnya sama dengan kegiatan jual beli biasanya, apabila mengacu pada Pasal 1458

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.” Sehingga hal ini juga erat kaitannya dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah sebuah perjanjian.

3. Faktor-Faktor Pemicu Adanya *Black Market* (Pasar Gelap)

Black Market (Pasar Gelap) kehadirannya tidak muncul dengan sendirinya akan tetapi terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pemicu hadirnya *Black Market* (Pasar Gelap), berikut merupakan pemicu terjadinya *Black Market* (Pasar Gelap) ini:

- a. Faktor Eksternal, titik berat faktor ini yakni pada kemajuan zaman dimana serba elektronik atau masa modernisasi. Promosi yang dilakukan melalui media social Instagram merupakan hal yang mempengaruhi dimana rakyat Indonesia menggunakan, sesuai survey pengguna media sosial Instagram terbesar ke-4 Di dunia yakni oleh Indonesia¹³.

Gambar 1:

Data pengguna Instagram Indonesia



(Foto: napoleoncat.com)

- b. Faktor Internal

Dalam hal membuat peraturan semua aspek telah diperhatikan oleh Lembaga yang berwenang akan tetapi hal

¹³Nuranisa Hamdan. 2019. https://www.tagar.id/pengguna-instagram-di-indonesia-terbesar-ke4-dunia_ diakses tanggal 15 Mei 2020

tersebut tidak sejalan dengan kemajuan teknologi yang juga berpengaruh pada peraturan terkait Black Market yang mana belum terdapat aturan yang spesifik mengenai Black Market.

D. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 B.W. (*burgelijk wetboek* atau KUHPerdato) yang terkenal sebagai Pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum *onrechtmatige daad*) memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata. Telah terjadi perdebatan hebat yang berlangsung bertahun-tahun lamanya di kalangan para sarjana di Negeri Belanda tentang arti daripada “*onrechtmatige daad*” ini¹⁴.

Hingga sekarang masih belum ada definisi yang positif dalam Undang-Undang tentang pengertian perbuatan melawan hukum ini. Semuanya diserahkan pada Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi. Menurut arrest 1919 tersebut di atas, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika¹⁵:

- a. melanggar hak orang lain;
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- c. bertentangan dengan kesusilaan;
- d. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

¹⁴ R. Setiawan. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Cetakan ke-6. Putra A Bardin, Bandung. Hal.75.

¹⁵ R. Setiawan. Op.Cit. Hal. 62.

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata di atas, gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sebelumnya adanya putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum memiliki pengertian yang sangat sempit, yaitu apabila perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang. Setelah adanya putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen Lindenbaum, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas menjadi melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat.

b. Adanya kesalahan; Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subjektif harus diteliti, apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya¹⁶.

¹⁶ Ibid. Hal. 84.

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya¹⁷.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan, tidak wajib membayar ganti rugi. Misalnya, anak kecil atau orang gila. Adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, yaitu dalam hal si pembuat melakukan suatu perbuatan, karena didorong oleh keadaan memaksa, misalnya karena ditodong senjata api atau harus merusak barang orang lain, atau dalam keadaan bahaya merusak jendela tetangganya untuk meloloskan diri dari kebakaran yang menimpa rumahnya¹⁸.

c. Adanya kerugian Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa¹⁹:

¹⁷ Hetty Hassanah, 2015. *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (e-commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. jurnal wawasan hukum, vol. 32, no. 1.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid. Hal. 85-86

1) kerugian materiil, dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad berulang-ulang telah memutuskan, bahwa Pasal 1246-1248 KUH Perdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperkenankan.

2) kerugian idiil, perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil: ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.

d. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori, yaitu²⁰:

1) *condition sine qua non* (Von Buri) Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian.

2) *adequate veroorzaking* (Von Kries) Menurut teori ini si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian, yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak

²⁰ Ibid. Hal. 86-87.

merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

E. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Salim H.S berpendapat jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat diantara penjual dan pembeli. Pada perjanjian tersebut penjual wajib memberikan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada pembeli dan berhak menerima hasil penjualan dan pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar dan berhak atas kepemilikan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan²¹.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli merupakan suatu kesepakatan dengan mana yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati, tentang saat terjadinya jual beli saat tercapainya kesepakatan kedua belah pihak atas harga dan bendanya meskipun kebendaan tersebut belum diberikan dan belum dibayar, merupakan kesimpulan dari Pasal 1458 KUH Perdata²².

Sehingga dari pengertian dua ahli tersebut dapat dikatakan jual beli merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang bersepakat atas suatu barang, dimana pembeli berkewajiban membayar dan penjual wajib memberikan benda tersebut.

2. Syarat-Syarat Jual Beli

²¹ Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 49

²² Rahayu Hartini, 2014, *Aspek Hukum Bisnis*, Malang: Citra Mandiri. Hal. 33

Syarat-syarat jual beli merupakan hal yang sama dengan syarat sahnya suatu perikatan dengan kata lain mengacu pada KUH Perdata Pasal 1320, yakni:

a. Adanya Kata Sepakat

Syarat yang pertama merupakan kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang tidak boleh ada keterpaksaan dari salah satu pihak atau dengan pihak lainnya, sepakat juga merupakan sebuah perizinan, terjadi karena kedua pihak sama-sama setuju tentang hal yang diperjanjikan dari suatu kontrak.²³

b. Cakap Dalam Suatu Perjanjian

Kecakapan dalam bertindak atau kemampuan melakukan perbuatan hukum yang artinya dapat menimbulkan akibat hukum, seseorang yang melakukan perjanjian harus orang yang cakap dan memiliki kedewasaan sebagai mana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yakni orang yang cakap telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

c. Suatu Hal tertentu (Objek Perjanjian)

Objek di sini dapat dikatakan benda maupun penyedia jasa, objek ini dapat dinamakan prestasi, prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu

²³ Salim. 2008 *Hukum Perjanjian Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. cetakan 5. Hal.33

- 3) Tidak berbuat sesuatu
- 4) Tidak menggunakan merek dagang tertentu.

d. Suatu Sebab yang Halal

Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian sebab yang halal. Abdul Kadir Muhammad mengemukakan pendapat, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum²⁴. Selain syarat yang disebutkan yang pada dasarnya perjanjian haruslah memuat beberapa unsur yakni:

- 1) Unsur *essentialia*, merupakan unsur pokok wajib ada dalam sebuah perjanjian, dimana identitas para pihak harus tercantum begitu pula pada saat menggunakan media elektronik.
- 2) Unsur *naturalia*, unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan seperti halnya itikad para pihak.
- 3) Unsur *accedentialia*, unsur tambahan seperti barang yang sudah dibeli tidak boleh di kembalikan.

3. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli

Asas yang terdapat dalam perjanjian umumnya ada pada jual beli pula, beberapa asas dalam perjanjian yakni:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

²⁴ Abdul Kadir Muhammad. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni. Hal. 20

Kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dalam asas ini memberikan kebebasan untuk:

- 1) Membuat atau tidak suatu perjanjian
- 2) Melakukan atau mengadakan perjanjian dengan siapa pun dalam suatu kepentingan
- 3) Menentukan isi yang diperjanjikan, pelaksanaan dan syarat, dan
- 4) Menentukan bentuk perjanjian itu sendiri, di sini yang dimaksud yakni tertulis atau secara lisan.

Asas kebebasan berkontrak memiliki makna dimana setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum diatur pada undang-undang. Asas ini dibatasi dengan 3 (tiga) hal yakni tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum.

b. Asas Konsensualisme

Asas *konsensualisme* mengandung pengertian yakni pada umumnya suatu perjanjian diadakan tidak secara formal melainkan cukup kesepakatan oleh para pihak saja, hal ini yang dinamakan persesuaian kehendak dan pernyataan dari para pihak yang melakukan suatu perjanjian hal ini mengacu pada Pasal 1320 KUH

Perdata dimana setiap orang mengikatkan dirinya atas suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

c. Asas Mengikatkan diri pada Perjanjian

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Setiap pihak yang membuat suatu perjanjian, secara langsung pihak tersebut terikat dalam pemenuhan janji, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian.

d. Asas Itikad Baik

Pada asas itikad baik terdapat pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Itikad baik sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yakni²⁵:

1) Objektif

Dalam sifat objektif ini dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh para pihak, khususnya tindakan sebagai pelaksanaan suatu perjanjian yang diadakan.

2) Subjektif

Itikad baik subjektif ada pada waktu berlakunya hubungan hukum antara para pihak, dimana hubungan hukum ini berupa kiraan dalam hati yang bersangkutan, bahwa syarat yang diperlukan dalam pemenuhan hubungan hukum

²⁵ Handri Rahardjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia. Hal. 45

terpenuhi, dengan kata lain pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan akibat dari dipenuhinya syarat tersebut.

Dalam asas itikad baik juga memiliki indikator yang menjadi tolak ukur dikatakan ber itikad baik dalam sebuah perjanjian, Asas itikad baik tersebut meliputi seluruh tahap perjanjian, diantaranya tahap pra perjanjian, tahap perjanjian, dan tahap pasca perjanjian. Berikut ini adalah pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli secara online²⁶:

- 1) Tahap Pra Perjanjian Tolak ukur adanya asas itikad baik pada tahap pra perjanjian adalah para pihak saling bertukar informasi.
 - i. Penawaran, Informasi yang diberikan pada saat penawaran yaitu memuat indikator identitas usaha pedagang, gambar barang, harga dan cara pembayaran barang, serta cara penyerahan barang.
 - ii. Penerimaan, Informasi yang diberikan pada saat penerimaan yaitu memuat indikator nama calon pembeli, alamat, nomor yang dapat dihubungi, dan barang yang dipesan.
- 2) Tahap Perjanjian, Tolak ukur adanya asas itikad baik pada tahap perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara para pihak. Indikator adanya kesepakatan di antara para pihak diantaranya terdapat 2 (dua) pihak, dan dalam jual beli online berdasarkan

²⁶ Fatia Gupit., 2018. *Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online di Beteng Trade Center Surakarta*. Privat Law Vol: 6 NO: 1

Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan penawaran oleh pedagang melalui media internet diterima dan disetujui oleh calon pembeli dan persetujuan atas penawaran pedagang oleh calon pembeli dengan pernyataan penerimaan melalui media internet

- 3) Tahap Pasca Perjanjian, Tolak ukur asas itikad baik pada tahap pasca perjanjian adalah para pihak melaksanakan kewajibannya, pembeli membayar barang dan pedagang menyerahkan barang.

Adapun Mariam Darus Badruzaman mengemukakan pendapat bahwa terdapat 8 asas dalam perikatan²⁷:

- a. Asas Kepercayaan,
- b. Asas Persamaan Hukum,
- c. Asas Keseimbangan,
- d. Asas Kepastian Hukum,
- e. Asas Moral,
- f. Asas Kepatutan,
- g. Asas Kebiasaan,
- h. Asas Perlindungan.

²⁷ Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.15

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) di jelaskan secara terperinci tentang hak dan kewajiban konsumen dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa, hal ini diatur pada pasal 4 UUPK yakni²⁸:

- a. Hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak dalam memilih barang dan/atau jasa dan menerima barang sesuai dengan nilai tukar serta kondisi yang terjamin sesuai dengan perjanjian/kontrak.
- c. Hak mengenai informasi barang dan/atau jasa secara lengkap, benar dan jelas.
- d. Hak pelayanan yang benar, jujur dan tidak ada diskriminatif.
- e. Hak dalam mendapat kompensasi dan ganti rugi atas ketidak sesuaian barang dan/atau jasa yang diterima.

Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen ada pada penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni²⁹:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian hal ini ditujukan untuk keamanan dan keselamatan konsumen.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi.

²⁸ Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- c. Melakukan pembayaran sesuai nilai tukar barang dan/atau jasa yang diinginkan.
- d. Menjalani dan mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen apabila terjadi sengketa.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 4 dan 5 UUPK telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen, yang kemudian hal serupa juga didapatkan atas hak dan kewajiban oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berikut penjabarannya³⁰:

- a. Hak menerima pembayaran yang sesuai kesepakatan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak dalam melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa.
- d. Hak rehabilitasi nama baik apabila dalam sengketa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang lain diatur pada ketentuan perundang-undangan

³⁰ Pasal 6 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 7 dijabarkan tentang kewajiban pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasanya dan isi dari Pasal 7 UUPK yakni³¹:

- a. Beritikad baik saat memperdagangkan barang dan/atau jasanya.
- b. Memberikan informasi yang lengkap, jelas dan jujur serta memberi penjelasan, perbaikan dan pemeliharaan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- c. Melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa.
- e. Memberikan kesempatan konsumen untuk menguji serta memberikan jaminan (garansi).
- f. Penggantian kerugian atas barang dan/atau jasa akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan.
- g. Memberikan kompensasi atas barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

F. Tinjauan Umum Impor

1. Pengertian Impor

Impor merupakan kegiatan masuknya barang ke dalam wilayah pabean (UURI No.17 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabean Pasal 1) Impor adalah suatu kegiatan pembelian produk dari penjual yang berada di luar negeri, yang oleh karenanya adanya perbedaan mata uang, nilai tukar, dan peraturan

³¹ Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

perdagangan, serta resiko bisnis yang besar maka diatur ketentuan tentang tata cara pelaksanaan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan tata laksana Kepabeanan di Bidang Impor dan KEPMENKEU (Keputusan Menteri Keuangan) Nomor 453/KMK.04/2002 tentang tata laksana Kepabeanan di Bidang Impor.

2. Pengertian Importir

Importir dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015, yang dikatakan importir merupakan orang perseorangan atau Lembaga atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum atau tidak, dimana melakukan impor, pada saat melakukan impor para pihak harus mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, persyaratan ini terlampir pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang API (Angka Pengenal Importir)³² dan harus melampirkan NIK (Nomor Induk Kepabeanan) dan nomor regis yang didapat dan registrasi di Kantor Bea dan Cukai. Dan proses registrasi ini melalui pemeriksaan pembukuan perusahaan, eksistensi dan *auditability* serta mengetahui ketentuan lainnya tentang tata laksana impor di wilayah Republik Indonesia³³.

3. Pengertian Barang Impor

³²Portal Informasi Indonesia. 2019. *Angka Pengenal Impor (API)*. <https://indonesia.go.id/layanan/kepabeanan/ekonomi/angka-pengenal-impor-api>. diakses tanggal 12 mei 2020

³³Inatrade. 2012. *layanan perijinan di bidang perdagangan secara elektronik*. <http://inatrade.kemendag.go.id/>. Diakses tanggal 12 mei 2020

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 4 menjadikan beberapa kelompok barang impor atau dapat dikatakan digolongkan semua peraturan perundang-undangan yakni:

a. Barang Bebas Impor

Dapat dikatakan semua barang yang bukan termasuk barang dibatasi impor, barang yang dilarang dan diatur ketentuan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan

b. Barang dibatasi Impor

Terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1814/KM.4/2016 tentang daftar barang yang dibatasi untuk diimpor maupun diekspor. Rincian barang yang dibatasi masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia:

- 1) Telepon Seluler, Komputer Tablet
- 2) Alat kesehatan
- 3) Minuman Beralkohol, dll

c. Barang dilarang Impor

Terdapat beberapa barang yang memang tidak boleh diimpor ke dalam wilayah Republik Indonesia beberapa contohnya juga di buat aturannya seperti:

- 1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- 2) Larangan impor untuk Jenis Bahan Perusak Lapisan Ozon yang disebutkan di dalam Lampiran II Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon.

- 3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/KEP/8/2003 Tahun 2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

4. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Impor

Para pihak yang ada pada kegiatan transaksi impor dan dengan fungsinya masing-masing sebagai berikut³⁴:

- a. Kelompok Indentor (pedagang, Pengusaha, Industriawan, dan instansi pemerintah)
- b. Kelompok Importir, dengan kata lain pemesan produk dan kelompokan lagi sebagai berikut:
 - 1) Pengusaha Impor (*Merchant*)
 - 2) *Approved Importer*, merupakan pengusaha impor yang dikhususkan pemerintah dan Departemen Perdagangan dalam hal mengimpor komoditas barang tertentu yang menurut pemerintah perlu ada.
 - 3) Importir Terbatas, izin yang diberikan berbentuk APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas)

³⁴ Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai Permasalahannya*. Edisi Kedua Jakarta: Sinar Grafika. Hal.16

- 4) Impor Umum, badan usaha yang dimana bergerak dalam mengumpulkan barang-barang ekspor maupun impor.

c. Kelompok pendukung

- 1) Badan Usaha Transportasi

Merupakan pengumpul muatan dan penyelenggaraan jasa pengangkutan, untuk melakukan ekspor dan impor melalui darat, laut, dan udara.

- 2) Bank

Pihak yang memberikan jasa perkreditan dan pembiayaan

- 3) Kantor Perwakilan dan Kedutaan

Dalam melakukan ekspor maupun impor tugas dari kantor perwakilan dan kedutaan yakni dalam hal legalitas untuk pengecekan dan pengesahan pengapalan suatu barang dari negara asal.

- 4) Surveyor

Juru periksa terhadap kualitas, cara pengemasan, kebenaran dokumen bagi barang yang impor maupun ekspor, di Indonesia perusahaan yang ditunjuk dalam hal ini yakni PT. Sucofindo.

- 5) Bea Cukai

Lembaga pemerintah yang bertindak sebagai pengaman jalur impor dan ekspor yang masuk wilayah pabean, bea cukai bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin pelepasan barang setelah dilakukan pembayaran bea masuk

5. Dokumen yang Diperlukan dalam Melakukan Impor

a. Dokumen Finansial

- 1) Bill of Exchange/ Wesel
- 2) Surat Askep (Promisory Notes)

b. Dokumen Komersial

- 1) Dokumen-Dokumen Pengangkutan
- 2) Invoice (Faktur)
- 3) CN23 (*Consignment Note*) dokumen perjanjian pengiriman barang

6. Prosedur Impor

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2002 prosedur umum impor masuk ke Indonesia sebagai berikut:

- a. Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor melalui MPN G2
MPN G2 merupakan terobosan terkini yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penerbitan kode billing dalam suatu pembayaran pajak, bea dan cukai dengan mudah dan cepat.
- b. Kemudian diterbitkan PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
- c. INSW (*Indonesia National Single Window*), sebuah system yang memungkinkan suatu penyimpanan data dan informasi secara tunggal dan pembuat keputusan tunggal dalam pemberian izin kepabean dan pengeluaran barang. Di dalam INSW sendiri memiliki alur, alur INSW transaksi impor:

- 1) Menampung data base perizinan berdasarkan peraturan dari instansi teknis (*Government Agency*) dalam hal Larangan dan pembatasan impor
 - 2) Instansi Teknis meng-upload perizinan diterbitkannya portal INSW
 - 3) Portal INSW melakukan pengecekan PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Pengecekannya antara lain Nomor Aju PIB, NPWP, tanggal perizinan, kode izin dan masa berlaku.
 - 4) Pengecekan *by system*, oleh Kantor Bea dan Cukai terkait proses lebih lanjut atas impor barang
 - 5) Apabila terdapat ketidak sesuaian, maka Portal INSW akan memberikan respons penolakan secara elektronik melalui Modul EDI Importir PPJK
- d. Kemudian terdapat manajemen resiko yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang yakni PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen) dalam proses pengeluaran barang, terdapat 3 jalur untuk dilakukan dalam melakukan pengecekan barang yakni:
- 1) Jalur Merah, merupakan jalur pelayanan impor dengan cara memeriksa fisik barang impor, pada saat ini akan dikeluarkan Surat Penetapan Jalur Merah (SPJM) akan dilakukan pembongkaran muatan, beban biaya merupakan tanggung jawab importir.

2) Jalur Kuning, jalur transit yang dimana pada jalur ini diwajibkan dilakukan pemeriksaan dokumen dan hasil pemeriksaan ini akan menentukan apakah importasi dapat masuk ke jalur hijau atau ditetapkan melalui jalur merah, yakni dilakukan pengecekan fisik

3) Jalur Hijau, jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan profil yang baik dengan hanya memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan dengan lama pemeriksaan 30 hari dan barang dapat dikeluarkan dan Pelabuhan dan dipastikan tidak ada hambatan (tidak memerlukan cek fisik)

e. SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang). setelah melalui tahap pengecekan dan perizinan maka barang yang lolos dan dinyatakan boleh dikeluarkan akan mendapat SPPB oleh bea cukai tujuan.

7. Pungutan Impor

1. Pungutan Pemerintah

Tarif ini ditentukan oleh Menteri Keuangan dan berlaku sama seluruh wilayah Indonesia, berikut jenis pungutannya:

- 1) Bea Masuk / Bea Masuk Tambahan
- 2) Pajak Penambahan Nilai (PPN) / PPN BM (Barang Mewah)
- 3) PPH Pasal 22

G. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut istilah perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris yakni *legal protection*, dalam Bahasa Belanda dikenal juga *rech beschering*, dan kemudian dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut, (1) hal (Perbuatan) (2) tempat berlindung, (3) Proses, tata cara, perbuatan untuk melindungi³⁵. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, supaya kepentingan manusia dapat terlindungi sesuai peraturan perundang-undangan, serta hukum haruslah dijalankan secara profesional tanpa memandang tinggi rendah derajat seseorang.

Setiono mengatakan, perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang di pandang tidak sesuai dengan norma yang melenceng atau kesewenang-wenangan oleh penguasa dimana dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin ketertiban dan ketentraman³⁶. Sutjipto Raharjo juga memberikan pendapat bahwa perlindungan hukum artinya memberi pengayoman atas hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, karena tujuan hukum menurutnya merupakan pemberian perlindungan hukum yang harus diwujudkan dengan adanya kepastian hukum³⁷.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/perlindungan>. diakses pada tanggal 5 Mei 2020

³⁶ Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Hal 3

³⁷ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 53

Setelah memberikan penjelasan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang atas perbuatan yang dimana hak yang dimiliki orang tersebut telah dilanggar oleh orang lain yang sewenang-wenang terhadap hak-hak yang dimiliki seseorang.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Pada perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat, dasarnya adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah bangsa Indonesia. Menurut Philipus M Hadjon, prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) yakni ³⁸:

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan

hukum bagi masyarakat berdasar pada Pancasila yang diawali dengan uraian konsep dan deklarasi mengenai hak-hak asasi yang dimiliki rakyat.

b. Prinsip Negara Hukum

Merupakan landasan dalam terbentuknya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah, dikaitkan dengan prinsip pertama, maka HAM mendapat peringkat pertama sebagai tujuan dari terbentuknya kedua prinsip diatas.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya dalam melindungi masyarakat

³⁸ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hal.19

terhadap harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap orang dari tindakan yang sewenang-wenang.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam perlindungan hukum beberapa ahli membedakan dalam beberapa bentuk, seperti halnya Muschsin, membedakan perlindungan hukum menjadi 2 bentuk yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sebelum adanya pelanggaran, sepertihalnya dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan Batasan atau rambu dalam suatu kewajiban atau pemenuhan hak seseorang.

b. Perlindungan Hukum Represif

Dalam hal ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi yang akan diberikan atas perbuatan yang melanggar peraturan dengan cara memberikan hukuman denda, penjara, dan lainnya yang diberikan apabila sesudah terjadi sengketa untuk memberikan efek jera kepada pelanggar³⁹.

Kemudian ada pula Philipus M Hadjon berpendapat, perlindungan hukum bagi masyarakat terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif untuk

³⁹ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta.

magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hal. 20

mencegah terjadinya persengketaan, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa⁴⁰.

Dari 2 (dua) pendapat ahli diatas dapat kita lihat persamaan diantaranya yakni menentukan bentuk-bentuk menjadi 2 (dua) macam yakni preventif dan represif dimana para ahli tersebut memberikan penjelasan yang memiliki kesamaan arti yakni padan bentuk perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah dan represif untuk menyelesaikan sengketa. Kedua ahli tersebut mengemukakan pendapat yang merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan ketertiban, keadilan, kepastian, kedamaian dan kemanfaatan. Dari kedua teori tersebut, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

H. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang terdiri asas-asas yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan para konsumen. A.Z Nasution berpendapat, perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas yang mengatur dan melindungi konsumen dalam penyelesaian permasalahan dan hubungan penyediaan dan

⁴⁰ ibid

penggunaan barang dan/atau jasa antara produsen dan konsumen dalam berinteraksi sesama masyarakat⁴¹. Dalam hal ini yang dimaksud yakni Perlindungan Konsumen, merupakan upaya yang menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)⁴².

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen khususnya di Indonesia didasari oleh beberapa asas yang dipandang dapat memberikan tatacara dalam peng implementasian di tingkat praktis, dengan adanya asas-asas tersebut maka terdapat pijakan atau dasar dalam perlindungan konsumen bagi masyarakat⁴³. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa asas perlindungan konsumen dibagi menjadi 5 (lima)⁴⁴:

a. Asas Kemanfaatan

Pada asas ini bermaksud untuk meberikan amanat bahwa upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus bermanfaat bagi kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara menyeluruh.

b. Asas Keadilan

⁴¹ A.Z Nasution. 2002. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. Hal 22.

⁴² Rahayu Hartini. 2016. *Hukum Komersil*. Mlang: UMM Press. Hal.169

⁴³ Erman Rajagukguk dkk. 2000 *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. Hal.17

⁴⁴ Rahayu Hartini. op.cit. Hal.170

Yang dimaksud dalam asas ini yakni agar keikutsertaan seluruh masyarakat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan hak-hak pelaku usaha dan konsumen dan dalam melaksanakan kewajibannya secara adil dan tidak merugikan kedua pihak.

c. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Pada asas ini memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

d. Asas Kepastian Hukum

Dalam asas ini bertujuan supaya pelaku usaha dan konsumen mentaati peraturan dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta jaminnya kepastian hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

3. Pihak-Pihak Terkait

a. Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha, yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan di wilayah hukum Republik Indonesia, sendiri atau bersama-sama melalui sebuah perjanjian dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”⁴⁵. Pada dasarnya pelaku usaha dibagi menjadi 3 (tiga) macam berdasar sifat dan jenis usaha, yakni:

⁴⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 1) Produsen
- 2) Distributor
- 3) Investor

b. Konsumen

Konsumen adalah pemakai barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi ataupun bersama dalam memenuhi kebutuhan dan tidak untuk diperdagangkan⁴⁶.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan konsumen maka, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni⁴⁷:

- 1) konsumen merupakan setiap orang yang mendapat barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan yang diinginkan.
- 2) Konsumen antara merupakan setiap orang yang mendapat barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan Kembali.
- 3) Konsumen akhir yakni, setiap orang yang mendapat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

4. Hubungan Konsumen dengan Perlindungan Konsumen

Costumer Protection dan Konsumen dapat dilihat dari hubungan dengan perjanjian atau dengan kontrak yang ada. Bahwa perlindungan konsumen merupakan kontrak yang dibuat oleh pihak terkait tidak

⁴⁶ Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁷ Susanti Adi Nugroho 2018. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana. Hal. 60.

mengikat secara utuh dan terbatas hanya kepada pihak yang berkontrak, dan alasan pokok konsumen harus dilindungi :

- a. Melindungi konsumen untuk menghindari dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
- c. Melindungi konsumen untuk menjamin kelangsungan pembangunan yang bersumber dari konsumen masyarakat.
- d. Melindungi konsumen sebagaimana diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembangunan nasional.

5. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan diantaranya merupakan tindakan konsumen untuk melakukan transaksi bisnis dengan pelaku usaha kesepakatan diantara pelaku usaha dan konsumen ini membuat janji dari kegiatan usaha yang mereka jalankan bersifat mengikat keduanya yang disebut dengan kontrak. Dalam melakukan kegiatan usaha diatas dapat terwujud apabila pelaku usaha dan konsumen mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak⁴⁸.

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip tanggung jawab merupakan lanjutan dari hasil status legalitas hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam kontrak yang secara umum dibedakan menjadi 5 (lima) yaitu ⁴⁹:

⁴⁸ Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* Universitas Lampung. Hal 58-59.

⁴⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti.2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 92.

- a. Prinsip tanggung jawab berdasar unsur kesalahan (*liability based on fault*);
- b. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- e. Prinsip tanggung jawab adanya pembatasan (*limitation of liability*).

Bilamana kelima prinsip ini dikaitkan dengan UUPK, maka pengaturan pada UUPK merupakan modifikasi terhadap *liability based on fault* dengan *presumption of liability* dimana pelaku usaha dianggap bertanggung jawab atas barangdan/atau jasa yang diperdagangkan, kecuali pelaku usaha dapat membuktikan lain. Beban pembuktian yang diterapkan pada dasar pemikiran “praduga adanya kesalahan” (*presumption of fault*), sehingga beban pembuktian menjadi terbalik kepada pelaku usaha Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen⁵⁰.

I. Peranan Direktorat Jenderal Bea Cukai

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bea Cukai

Beacukai merupakan instansi yang berwenang dalam melakukan Bea dan Cukai, Bea dan Cukai memiliki pengertian masing-

⁵⁰ I Putu Pasek Bagiarta W. 2013. *Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kontrak Baku*. Jurnal IUS Vol.1 Nomor 1. Hal. 66

masing ,yakni Bea adalah sebuah pungutan biaya pada barang yang hendak dikirim atau diterima oleh suatu negara, dan sedangkan Cukai merupakan pungutan biaya kepada suatu negara dari sebuah barang yang sudah dikirimkan atau diterima.

Tugas dan fungsi Bea dan Cukai yakni berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, diantaranya memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22,PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak didalamnya termasuk bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

2. Lembaga Eksternal

Dalam menjalankan tugasnya bea cukai di bantu dengan lembaga-lembaga terkait, Bea dan Cukai juga berkerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk mempermudah arus ekspor impor. Untuk memaksimalkan kegiatan ekspor impor lembaga-lembaga berikut bekerja sama dengan Bea Cukai dari regulasi serta izin ekspor impor barang kebutuhan dalam maupun luar negeri:

- a. Kementerian Informasi dan telekomunikasi: Peraturan Menteri Kominukasi dan Informatikan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Oprasional Sertifikasi alat perangkat telekomunikasi
- b. Kementerian Kesehatan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan

Farmasi dan Alat Kesehatan dan Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Nomor Hk.02.03/1/767/2014 tentang pedoman pelayanan izin edar alat kesehatan

- c. Kementerian Perdagangan: Peraturan Menteri Perdagangan No. 85/M-DAG/PER/10/2015 jo. 64/M-DAG/PER/8/2017 Kain rajut untuk pakaian dan Peraturan Menteri Perdagangan republik indonesia nomor 118 tahun 2018 tentang ketentuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru.

3. Lembaga OSS (Online Single Submission)

Kemendag menghimbau kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan toko melalui sistem OSS (Online Single Submission) sesuai dengan Pasal 1 angka 9 PP 24/2018, yaitu izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) yang dilakukan oleh lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha diberikan Izin Usaha.

Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan

operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. Adapun Persyaratan sebelum Menggunakan OSS:

- a. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID.
- b. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU *Online*, sebelum mengakses OSS
- c. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Persyaratan dan Proses Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS Badan Usaha:

- a. Melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia.
- b. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) *email* ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS.
- c. *Email* verifikasi berisi *user-ID* dan *password* sementara yang bisa digunakan untuk *log-in* sistem OSS.

Prosedur Menggunakan OSS

- a. Kunjungi website <https://www.oss.go.id/oss/>
- b. Membuat *user-ID*
- c. *Log-in* ke sistem OSS dengan menggunakan *user-ID*
- d. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
- e. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
- f. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan⁵¹.

4. Landasan Hukum Tugas Bea Cukai

Dalam melakukan pengawasan dan penindak lanjutan mengenai ekspor-impor barang dan/atau jasa mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean. Pada Undang-Undang Kepabean ini terdapat beberapa unsur yang meliputi

- a. Keadilan
- b. Transparansi

⁵¹Lembaga Oss. *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. <https://www.oss.go.id/oss/>. diakses tanggal 21 September 2020

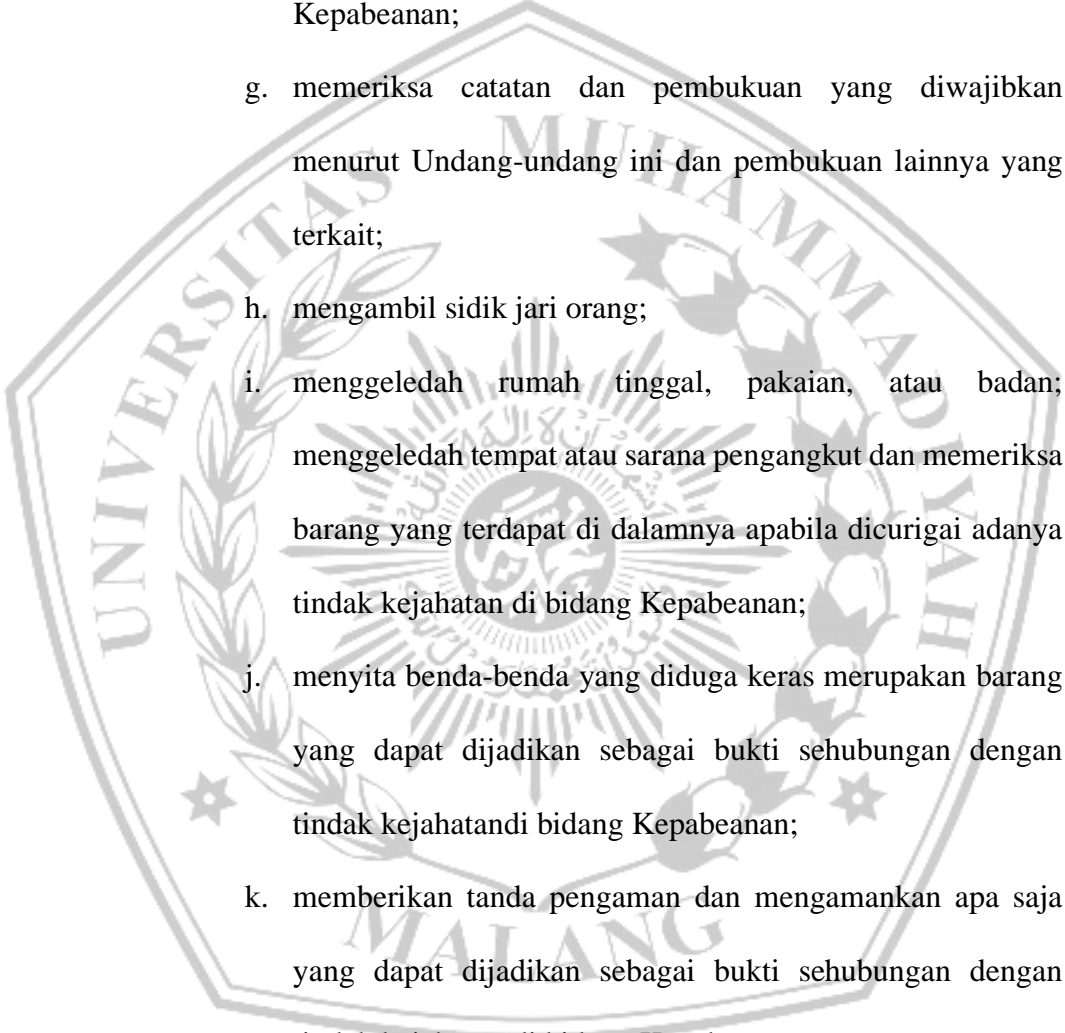
- c. Akuntabilitas
- d. Pelayanan public dan pembinaan pegawai diperlukan dalam mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian yang berkaitan dengan perdagangan global

Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan ini sebagai hukum fiscal (Pajak) yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

5. Tugas Penyidik Bea Cukai

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, Tugas dan wewenang Penyidik bea cukai:

- a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak kejahatan di bidang Kepabeanan;
- b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak kejahatan di bidang Kepabeanan;
- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak kejahatan di bidang Kepabeanan;

- 
- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak kejahatan di bidang Kepabeanan;
 - f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak kejahatan di bidang Kepabeanan;
 - g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
 - h. mengambil sidik jari orang;
 - i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan; menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak kejahatan di bidang Kepabeanan;
 - j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak kejahatan di bidang Kepabeanan;
 - k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak kejahatan di bidang Kepabeanan;
 - l. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak kejahatan di bidang Kepabeanan;

- m. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak kejahatan di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n. menghentikan penyidikan.

6. Alur Penyidikan oleh Penyidik Bea Cukai

Tahapan Penyidikan di Bea Cukai terdapat dua fase yakni Pra Penyidikan dan Penyidikan dalam penyelesaian kasus Kepabeanan⁵²:

- a. Terima Berkas/Tegahan;
- b. Penelitian Kasus, disini nantinya akan dilakukan sebuah penelitian terhadap sebuah kasus layak atau tidak untuk di sidik hal ini juga mempertimbangkan unsur keperdataan seseorang atas hak-haknya sehingga penyidik juga berpedoman dengan KUH Perdata;
- c. Jika tidak layak, akan dikembalikan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya karena tidak ada unsur pidananya. Yang mana dalam Pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 penyidik bea cukai mempunyai wewenang dalam menetapkan sanksi administratif apabila tidak terpenuhinya unsur pidana

⁵² Kemenkeu Learning center. 2018. *Tahap Pra Penyidikan dan Penyidikan Pidana Cukai*. <https://klc.kemenkeu.go.id/pusbc-penyidikan-pidana-cukai/> 2020 diakses tanggal 30 Agustus 2020

dengan membayar bea masuk sebanyak 4 kali bea masuk
Pasal 113 ayat 2 Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan pada
saat penelitian bea cukai juga berpedoman pada KUH
Perdata untuk nentukan Sanksi yang pantas;

- d. Jika layak, maka akan dilanjutkan dengan Gelar Perkara
dan diterbitkannya SPDP (Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan);
- e. Pemeriksaan Saksi-saksi fakta (ditetapkan oleh penyidik
Bea Cukai);
- f. Pemeriksaan tersangka (ditetapkan oleh penyidik Bea
Cukai);
- g. Penetapan tersangka (waktu penetapan 1 x24 jam);
- h. Penangkapan terhadap tersangka;
- i. Koordinasi dengan Pihak Rumah Tahanan (RUTAN)
untuk menitipkan tersangka;
- j. Pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka lanjutan;
- k. Pengamanan barang bukti termasuk didalamnya
 - 1) Surat Perintah Penggeledahan
 - 2) Permohonan izin penyitaan
 - 3) Surat perintah penyitaan
 - 4) Berita acara penyitaan
- l. Pemeriksaan Saksi Ahli
- m. Tahap Pemberkasan Administrasi penyidikan
- n. Pelimpahan kepihak Kejaksaan.

